BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, sehingga mereka saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, transaksi jual beli menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk menukar barang dengan metode tertentu. Namun, banyak orang yang tidak menyadari apakah transaksi yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam keseharian, manusia sering menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepemilikan barang, terutama dalam aspek ekonomi dan transaksi jual beli. Aktivitas ini cukup rumit karena terdapat aturan-aturan khusus yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha.¹

Salah satu aturan jual beli dalam hukum Islam, meliputi hal-hal yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli. Salah satu larangan dalam aktivitas ini adalah penjual tidak boleh berbohong atau menipu kepada pembeli, baik mengenai kualitas ataupun kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dengan demikian, penjual wajib menakar dan memilih barang dagangannya secara jujur serta sesuai dengan aturan yang berlaku.² Sebagai agama yang mengutamakan keadilan, Islam menjunjung tinggi kebenaran dan memberantas ketidakbenaran serta menghargai persaudaraan sesama umat Islam, kemudian menetapkan peraturan untuk memastikan

¹ Aprianti, dkk. "Praktek Jual Beli Arang Di Bandar Jaya Persepektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 6 Nomor 02, Desember 2023, 30-39.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) 44

bahwa transaksi bebas dari penipuan dan tidak ada yang dirugikan.³ Islam pun mengajarkan bahwa segala bentuk transaksi jual beli harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bersama. Sebagai contoh, jual beli yang dilakukan dengan akad *sahih* (kontrak yang sah) serta terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *dharar* (bahaya) dianggap sebagai aktivitas ekonomi yang halal dan diperbolehkan.⁴

Selain aturan tentang diperbolehkan atau yang dilarang, masyarakat juga harus memahami terkait rukun dan syarat sah jual beli. Kegiatan jual beli dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, seperti syarat dalam akad (ijab dan qabul), syarat bagi pelaku jual beli, begitu juga dengan syarat mengenai barang yang diperjualbelikan. Dalam proses ijab qabul, harus ada kesesuaian antara pernyataan ijab dan qabul, terutama yang berkaitan dengan harga barang yang ditransaksikan.⁵ Antara penjual dan pembelinya pun harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki akal dan kemampuan untuk membuat keputusan. Sementara itu, barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain bersih atau suci, bermanfaat, sah dimiliki oleh pihak yang melakukan transaksi, dapat diserahkan, memiliki status yang jelas, serta dapat diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, tidak semua barang atau benda, bebas untuk diperjualbelikan melainkan harus memenuhi syarat di atas.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. GRAFINDO PERSADA, 2010), 69.

⁴ Saleh, Hendy Irawan. "Implementasi Investasi Saham Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Milenial." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, Volume 2, Nomor 1, 2021, 1-21.

⁵ S Shobirin. "Jual beli dalam pandangan Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3 Nomor 2 2016, 239-261.

Dalam Islam, kegiatan jual beli tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan pribadi semata, melainkan harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi kepentingan masyarakat secara umum. Transaksi yang mendukung pemerataan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial merupakan bentuk jual beli yang dianjurkan. Namun, dalam masyarakat yang mengalami ketimpangan ekonomi, sering kali muncul aktivitas transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, seperti eksploitasi. Sosiologi hukum Islam mempelajari bagaimana penerapan hukum Islam dapat membantu mengatasi gejala sosial dengan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil melalui transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Salah satunya yakni gejala sosial terhadap aktivitas transaksi jual beli hasil tembakau ilegal. Aktivitas jual beli hasil tembakau seperti rokok ilegal terjadi di masyarakat bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi karena harga rokok legal terus melambung akibat cukai rokok yang terus dinaikkan oleh pemerintah. Kenaikan cukai tersebut dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi rokok. Akan tetapi, di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, rokok merupakan barang konsumsi yang masih dianggap penting dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Dengan naiknya biaya rokok legal, masyarakat kemudian mencari alternatif yang lebih murah, yaitu membeli rokok ilegal atau tembakau lintingan atau biasa disebut tembakau linting sendiri. Meskipun harganya murah, tembakau lintingan pun ada aturan terhadap peredarannya.

Menurut Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 1,

⁶ Dani Suryaningrat, Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Pada Periode Kedua Mengenai Konsep Distribusi, *Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* Vol. 9 No. 2 Juli 2023, hal. 85-97

etil alkohol, minuman beralkohol, dan produk tembakau termasuk dalam kategori barang kena cukai. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khusus yang dimiliki barang-barang tersebut, seperti perlunya pengendalian konsumsi dan pengawasan peredarannya. Selain itu, pemakaiannya dapat menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah mengenakan cukai sebagai bentuk pungutan negara demi menjaga keadilan dan keberlanjutan.⁷

Dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang cukai, dijelaskan bahwa cukai tidak dikenakan pada tembakau iris yang berasal dari tanaman tembakau lokal, yaitu hanya dari tanaman tembakau yang dibudidayakan di Indonesia, tanpa campuran tembakau impor. Tidak dikemas untuk penjualan eceran, yaitu tidak dikemas dalam satuan kecil yang siap dijual ke konsumen akhir atau dikemas dengan bahan pengemas tradisional yang umum digunakan yaitu menggunakan bahan pembungkus yang lazim di masyarakat seperti plastik tanpa merek. Selain itu, pengecualian cukai ini berlaku jika dalam proses pembuatannya tidak dicampur dengan tembakau luar negeri atau bahan tambahan lain yang biasa digunakan dalam produksi hasil tembakau.⁸ Dari ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 pasal 8 ayat (1) tentang cukai, dapat dipahami, bahwa tidak semua produk tembakau dikenakan cukai selama memenuhi beberapa syarat di atas.

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa “asal segala sesuatu adalah mubah (diperbolehkan) sampai ada dalil yang melarangnya” Kaidah ini

⁷ Diakses melalui <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6166/hasil-tembakau-termasuk-jenis-barang-kena-cukai> pada 24 Januari 2025.

⁸ Pasal 8 ayat 1 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai.

menegaskan bahwa hukum asal suatu perbuatan dalam muamalah, termasuk jual beli, adalah boleh, kecuali terdapat dalil syar'i yang melarangnya.⁹ Dalam konteks jual beli barang ilegal perbuatan ini bertentangan dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara melalui lembaga yang sah. Secara normatif, dalam hukum Islam tidak ada dalil yang secara tegas mengatur hukum jual beli barang ilegal apakah haram atau tidak, sebagai teori mengkorelasikan dengan kaidah tersebut dengan kegiatan jual beli produk ilegal, hukum Islam menempatkan perintah untuk taat kepada *ulil amri* (pemimpin) sebagai kewajiban, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta taatilah para pemimpin di antara kalian. Jika terjadi perselisihan dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah (melalui Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (melalui sunah) jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih baik bagi kalian dan akan membawa dampak yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat.”

Seruan dalam Surah an-Nisa' ayat 59 ditujukan kepada kaum mukmin agar mereka menaati *ulil amri*. Namun, ketaatan ini bersyarat, yaitu setelah *ulil amri* terlebih dahulu menaati Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, ayat ini juga memerintahkan agar dalam perselisihan, umat Islam kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini menunjukkan bahwa kaum Muslim harus memiliki pemerintahan yang ditaati, karena tanpa itu, segala urusan akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, ayat

⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah* (Mataram: Sanabil, 2020), cet. 1, 41.

ini menegaskan bahwa mereka yang diberi amanah sebagai *ulil amri* wajib ditaati selama mereka menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum Allah.¹⁰

Dalam hal ini, bentuk aktivitas jual beli produk ilegal tergolong bentuk ketidaktaatan terhadap aturan perundang-undangan. Hal ini ditegaskan oleh ketua majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Garut, KH. Sirojul Munir memberikan fatwa bahwa rokok ilegal hukumnya haram karena bertentangan dengan undang-undang.¹¹ Hal ini, pemerintah dalam membuat aturan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, maka harus dipatuhi. Merujuk pada kitab fikih *al-Baḥr al-Muḥīṭ ats-Tsajjāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ* al-Imām Muslim Ibn al-Ḥajjāj, karya Syaikh Muḥammad ‘Ādam al-It̤yūbī, dijelaskan sebagai berikut:

“Akan tetapi, ketaatan ini, sebagaimana disyaratkan bahwa perintah penguasa tidak boleh dalam perkara maksiat, maka ia juga disyaratkan harus berasal dari kemaslahatan, bukan dari hawa nafsu atau kezaliman. Sebab, seorang penguasa tidak ditaati karena pribadinya, melainkan ditaati karena ia memegang amanah untuk mengatur kepentingan umum. Maka, jika ia memerintahkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan kaum Muslimin, maka perintah tersebut berasal dari dirinya sebagai individu, bukan sebagai pemimpin yang sah. Oleh karena itu, perintah tersebut tidak memiliki kekuatan sebagaimana perintah resmi dari seorang penguasa.”¹²

Bentuk ketaatan kepada pemerintah (*ulil amri*) memiliki beberapa syarat, yaitu apabila tidak untuk maksiat, memiliki kandungan maslahat, tidak ada bentuk kezaliman bagi masyarakat, serta tidak bersifat materi.

Dijelaskan pula ketaatan terhadap *ulil amri* dari kitab *‘Umdah al-Qārī Syarḥ*

¹⁰ Sulaiman Kurdi, dkk, Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) Di Dalam Surah An-Nisa : 59, Al-Anfal :46 Dan Al-Maidah : 48-49 (Analisis Tafsir Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, Dan Ibnu Katsir), *Journal of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2017, 35.

¹¹ Diakses melalui <https://radargarut.jabarekspres.com/2023/12/14/ketua-mui-garut-beri-fatwa-rokok-ilegal-hukumnya-haram/> pada 20 Juni 2025

¹² Muḥammad bin ‘Alī bin Ādam bin Mūsā al-It̤yūbī al-Wālī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ al-Thajjāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim bin al-Ḥajjāj*, cet. 1, 1426–1436 H (Riyād: Dār Ibn al-Jawzī), juz 32, h. 106.

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya al-‘Allāmah Badr al-Dīn al-‘Ainī, sebagai berikut:¹³

وَذَكَرَ عِيَاضٌ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَىٰ وُجُوبِ طَاعَةِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ ۝

“Para ulama telah sepakat atas wajibnya taat kepada imam dalam hal yang bukan maksiat, dan haramnya taat kepada imam dalam perkara maksiat.”

Dalam kitab *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, kitab tentang hukum pidana Islam, karya Syekh Abdul Qadir Audah, dijelaskan kewajiban taat terhadap *ulil amri*, berikut penjelasannya:

“undang-undang, keputusan, dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah mengikat dan wajib ditaati secara syar‘i, dengan syarat bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash syariat yang tegas dan tidak keluar dari prinsip-prinsip umum maupun ruh pembentukan hukum dalam Islam. Jika bertentangan, maka peraturan tersebut menjadi batal secara mutlak.”

Jika dikaitkan pada kebijakan pemerintah terhadap memberlakukan UU cukai, dapat dilihat bahwa UU tersebut merupakan produk hukum yang sah dan mempunyai daya ikat yang kuat terhadap seluruh warga negara. Karena ditetapkan melalui proses legislatif yang diatur oleh konstitusi. Penerapan cukai rokok memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengurangi dampak negatif rokok.¹⁴ Dengan demikian, penerapan cukai oleh pemerintah bukanlah bentuk kezaliman selama tetap memperhatikan prinsip masalah (kebaikan umum). Selama keputusan tersebut bukan hasil dari hawa nafsu, tapi berdasarkan pertimbangan kesehatan dan sosial, maka masyarakat wajib menaatinya sebagaimana

¹³ Badr al-Dīn Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-‘Aynī, *Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 14, hlm. 221, dikoreksi dan dikomentari oleh sebuah lembaga ulama dengan bantuan Administrasi Percetakan al-Munīrah, milik Muḥammad Munīr ‘Abduh Aghā al-Dimashqī.

¹⁴ Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

prinsip taat kepada *ulil amri*. Mengacu pada kaidah fikih diatas, jual beli barang ilegal, meskipun tidak dilarang secara tekstual dalam nash, menjadi haram karena bertentangan dengan aturan pemerintah yang sah.

Akan tetapi, pada realitanya, beberapa pelaku usaha dalam memperjualbelikan produk tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti praktik jual beli tembakau di daerah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Pada saat awal melakukan observasi dan wawancara kepada penjual tembakau ilegal di daerah tersebut, mengenai alasan mereka menjual produk itu, ternyata memiliki alasan sederhana dalam menjalankan usahanya. Mereka berjualan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, hasil penjualan produk hasil tembakaunya cenderung lebih laris karena harganya lebih murah dibandingkan rokok kemasan yang dikenakan cukai. Mereka juga beranggapan bahwa tembakau yang dijual tidak memerlukan cukai karena merupakan tembakau racikan. Ditambah lagi, mayoritas masyarakat di daerah mereka adalah perokok, sehingga permintaan terhadap tembakau tetap tinggi dan bisnis ini dianggap sebagai peluang yang menguntungkan.¹⁵

Dari keterangan pembelinya juga mempunyai beberapa alasan membeli produk ilegal tersebut. Alasan utamanya untuk menghemat pengeluaran. Menurutnya, membeli tembakau liting jauh lebih ekonomis karena dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan rokok kemasan. Ia menjelaskan bahwa dengan membeli tembakau liting, stok tembakau yang dimilikinya bisa bertahan hingga seminggu, sementara jika

¹⁵ Hasil wawancara dengan Penjual Tembakau di daerah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, (06 Februari 2025).

membeli rokok kemasan, persediaannya hanya cukup untuk satu hari. Dengan kondisi tersebut, ia merasa bahwa membeli tembakau linting adalah pilihan yang lebih hemat dan lebih menguntungkan secara ekonomi.¹⁶

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat. Dari ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No.39 Tahun 2007 di atas dapat diketahui, bahwa dalam pembuatan hasil tembakau jika dicampur dengan tembakau luar negeri atau bahan lain, maka tidak memenuhi persyaratan tidak dipungutnya cukai. Dalam kasus ini, penjual tembakau di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, memperjualbelikan tembakau iris racikan, yang mana tembakau tersebut sudah diberi bahan-bahan lain seperti, cengkeh dan saus tembakau, sehingga memiliki aroma dan rasa tertentu, dengan kata lain, tembakau yang diperjualbelikan termasuk barang ilegal.¹⁷ Sehingga bentuk aktivitas tersebut merupakan bentuk melanggar aturan pemerintah yang sah dalam hal penerapan cukai atas produk tembakau, yang mana dalam Islam dinilai tidak taat terhadap pemimpin (*ulil amri*). Karena ketaatan terhadap pemimpin adalah wajib hukumnya, sehingga bentuk aktivitas jual beli tersebut haram dilakukan.

Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang di atas, peneliti akan melanjutkan penelitian dengan judul **“Praktik Jual Beli Tembakau Tanpa Cukai Di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam”**.

¹⁶ Hasil wawancara dengan pembeli tembakau di daerah Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, 06 Februari 2025.

¹⁷ Pasal 8 ayat 1 UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terhadap jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu menyajikan pemahaman dan informasi yang bermanfaat tentang praktik jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait praktik jual beli tembakau tanpa cukai di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

- b. Bagi Akademis

Penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi peneliti lain yang berminat

untuk mengeksplorasi kajian mengenai perdagangan hasil tembakau, kebijakan cukai, dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan menjadi sumber informasi mengenai jual beli tembakau tanpa cukai.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Deby Aprilia, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2021, Dengan Judul “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”¹⁸

Hasil riset menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli tembakau dengan metode boyongan di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, terdapat sejumlah pihak yang terlibat, yang meliputi petani, pemboyong, pedagang yang bekerja dengan pemboyong, serta pedagang yang tidak terikat dengan pemboyong. Proses jual beli ini dilakukan dalam beberapa langkah. Pertama, pedagang terlebih dahulu mencari tembakau yang sudah dipanen para petani. Kedua, pedagang memberikan penawaran harga kepada petani setelah mengevaluasi kualitas tembakau. Ketiga, jika harga yang ditawarkan dirasa tidak

¹⁸ Deby Aprilia, “*Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Boyongan Di Desa Jatibanteng Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*” Skripsi, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 2021).

memadai, petani akan mengajukan harga yang lebih tinggi sehingga terjadilah negosiasi. Keempat, tembakau ditimbang untuk memastikan beratnya sesuai kesepakatan harga. Kelima, pedagang membawa tembakau yang telah ditimbang kepada pemboyong. Keenam, pemboyong akan menimbang kembali tembakau yang diterima. Ketujuh, pemboyong membuat pembayaran kepada pedagang berdasarkan berat yang tertera. Kedelapan, pedagang pun memberikan pembayaran kepada petani.

Dalam praktik sistem boyongan ini, terdapat empat pihak utama yang berperan, yaitu petani, pemboyong, pedagang anak buah pemboyong, dan pedagang yang bukan anak buah pemboyong. Perjanjian jual beli ini memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam perjanjian dari sudut pandang hukum Islam. Namun praktik tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini karena monopsoni, yaitu satu pembeli yang menguasai pasar, membatasi persaingan sehat antar pelaku usaha.

Persamaan dari penelitian dahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas transaksi tembakau. Namun, perbedaan dari penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengkaji jual beli tembakau melalui sistem boyongan, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada jual beli tembakau tanpa cukai.

2. Skripsi yang di susun oleh Aulia Allaviyah jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Progam Studi Hukum Ekonomi

Syariah. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020 dengan judul “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Zat Campuran menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”¹⁹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli tembakau yang mengandung zat campuran di Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, jika dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, tidak sepenuhnya mematuhi prinsip syariat. Ketidaksesuaian ini terutama terlihat dalam rukun dan syarat dari jual beli, di mana ada elemen penipuan (*gharar*) dalam objek dari transaksi antara tengkulak tembakau dan perwakilan pabrik. Adanya elemen penipuan ini dapat merugikan perwakilan pabrik atau pengepul, sehingga transaksi tersebut menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Penggunaan zat tertentu dalam tembakau telah menjadi kebiasaan turun-temurun di Desa Sumberdadi dan dianggap sebagai bagian dari adat (*urf*) masyarakat setempat. Namun, kebiasaan ini dianggap sebagai *urf fasid* karena tidak sesuai dengan aturan syariat. Petani di desa tersebut melakukan praktik yang tidak diperbolehkan dalam Islam dengan menambahkan zat campuran saat mengolah tembakau, yang termasuk dalam kategori praktik penipuan.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya, di mana penelitian sebelumnya membahas tentang praktik penjualan tembakau yang dicampur dengan zat lain, sementara penelitian

¹⁹ Aulia Allaviyah, “Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Zat Campuran menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel 2020).

ini meneliti perdagangan tembakau yang bebas dari cukai. Namun, keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas aspek jual beli tembakau.

3. Skripsi yang disusun oleh Dian Lissyafa'ati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah ,Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2023 dengan judul “Tinjauan Terhadap Jual Beli Tembakau Isen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngemplak Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)”²⁰

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tembakau isen tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Penipuan dalam bentuk *tadlis* atau *gharār* terkait kualitas tembakau ini dapat merugikan pihak pengepul. Oleh karena itu, segala bentuk *tadlis* atau *gharār* yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dianggap sebagai tindakan memanfaatkan harta orang lain secara batil dan zalim, sehingga hukumnya tidak diperbolehkan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu membahas praktik jual beli tembakau isen sedangkan penelitian ini membahas jual beli tembakau tanpa cukai. Persamaannya adalah keduanya membahas aktivitas jual beli tembakau.

4. Skripsi yang disusun oleh Wildatul Aliyah jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal

²⁰ Dian Lissyafa'ati, “*Tinjauan Terhadap Jual Beli Tembakau Isen Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngemplak Tarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali)*”, Skripsi, (Salatiga: UIN Salatiga, 2023).

Tanpa Cukai Di Indonesia”²¹

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut pandangan hukum Islam, praktik peredaran rokok ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelundupan yang disertai dengan pemalsuan dokumen. Tindakan semacam ini mencerminkan unsur kecurangan dan penipuan, yang secara prinsip bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam Islam, sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan yang diharamkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengenaan cukai atau pajak dipandang sebagai hal yang diperbolehkan. Kewajiban membayar pajak tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga mencakup seluruh warga negara tanpa membedakan agama. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung keberlangsungan dan pembangunan negara, yang menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kajian hukum Islam secara normatif sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif sosiologi hukum Islam. Keduanya memiliki kesamaan dalam membahas barang kena cukai yaitu produk tembakau tanpa cukai.

5. Skripsi yang disusun oleh Sofia Firdaus jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram 2022, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Dengan

²¹ Wildatul Aliyah, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia*”, *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023)

Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)”²²

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa di Desa Lekor, Kecamatan Janapria proses jual beli tembakau dengan perubahan harga secara sepihak, dilakukan dengan cara tembakau dijual dalam keadaan basah, sementara pembayaran baru diterima kepada petani apabila tembakau yang masih berada di sawah dikirim ke tempat penyimpanan barang. Dalam pelaksanaannya, pengepul tidak memberikan pembayaran penuh kepada petani. Hal ini dikarenakan, menurut pengepul, kualitas tembakau setelah proses pengeringan tidak sesuai dengan harapan, sehingga harga jual di gudang menurun. Beberapa faktor yang menyebabkan pembeli melakukan perubahan harga secara sepihak di Desa Lekor antara lain adalah kualitas tembakau yang tidak sesuai standar, sehingga pengepul mengalami kerugian dan tidak dapat membayar petani secara penuh. Selain itu, biaya produksi dari panen hingga pengiriman ke gudang yang sulit dikontrol turut menjadi penyebab meningkatnya pengeluaran, yang pada akhirnya berdampak pada perubahan harga tanpa kesepakatan ulang dengan petani.

Dari perspektif hukum Islam, aktivitas ini tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam karena terdapat unsur ketidakjelasan terhadap pembayaran dengan perubahan harga secara sepihak dalam praktik jual beli tembakau ini. Meskipun transaksi dilakukan secara sadar tanpa paksaan dan melibatkan pihak-pihak yang sudah dewasa serta berakal

²² Sofia Firdaus, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*”, *Skripsi*, (Mataram: UIN Mataram 2022).

sehat, jual beli ini tetap tidak sah. Hal ini disebabkan pengepul tidak sepenuhnya menjalankan kewajibannya, yakni tidak membayar petani secara penuh sesuai dengan kesepakatan awal dalam perjanjian. Dalam Islam, jika jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya maka dianggap sah termasuk pembayaran yang sesuai dengan perjanjian. Namun, apabila ada perubahan dari harga yang telah dijanjikan secara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Islam, seperti yang terjadi dalam kasus ini, maka transaksi tersebut dianggap telah melanggar prinsip Islam dan tidak sah serta dilarang karena terdapat unsur *gharār*.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu berfokus terhadap praktik jual beli tembakau dengan perubahan harga sepihak sedangkan penelitian ini berfokus terhadap jual beli tembakau tanpa cukai. Persamaannya sama-sama membahas jual beli tembakau.